

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adi Sulistiyono, Isharyanto. 2016. *Sistem Peradilan Di Indonesia*. Surakarta: kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. 2007. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*., Malang: Bayumedia Publishing.
- Hamzah, Andi. 2006, *Hukum acara pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2016. *KUHP dan KUHP*. Cet 20. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sabuan, Ansorie. *et.al. Hukum Acara Pidana*. 1990. Bandung: Angkasa.
- Didik M Arif Mansur & Elisatris Gultom. *Cyber Law*. 2005. Bandung: Refika Aditama.
- Nawangasasi, Endah Dewi. 2016. *Hukum Administrasi Dalam Perspektif Cyber Law Terkait Data Privasi Dan Beschikking Digitalisasi*. Bandung: PT Alumni.
- Hari Sasangka & Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Hotma P. Sibuea & Dwi Seno Wijanarko, 2020. *Dinamika Negara Hukum*, Depok: Rajawali Printing.
- Suhendi, Hendi. *et.al.* 2016. *Kekuatan nilai Pembuktian terhadap alat bukti elektronik dalam penangana tindak pidana*. Jakarta: Miswar.
- Lanka Amar & Samsul Fadli, 2019, *Metode Penemuan Hukum (Pembuktian Elektronik dan CCTV Pada Peradilan Pidana)*, Yogyakarta: UII Press.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2014. *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Harahap, M. Yahya. 2007, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan: edisi kedua*, Cet.9. Jakarta: Sinar Grafika..
- Munir, Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (pidana dan perdata)*. Bandung: Citra Aditya.
- Kaligis, Oc. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana*. Bandung: PT Alumni.
- Agustine, Oly Viana. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*. Depok : Raja Grafindo.
- Amin, Rahman. 2020. *perlindungan hukum Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Atmasasmita, Romli 1996. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Cet.2. Bandung: Bina Cipta
- Rusli, Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. YOGYAKARTA: UII Press.

Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana; Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan*. Jakarta: kencana.

Endah Dewi Nawangsasi, 2016. *Hukum Administrasi Dalam Perspektif Cyber Law Terkait Data Privasi Dan Beschikking Digitalisasi*. Bandung: PT Alumni.

B. Perundang-undangan

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas UU No 20 Tahun 2001

Undang-Undang No 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang perubahan atas UU No 25 Tahun 2003

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

Ahmad Bahiej, Jurnal, “*Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materil di Indonesia*”, Februari 2006.

Carla Nathania, skripsi, “*Perlindungan Hak Tersangka Melalui Penerapan Exclusionary Rules of Evidence Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, 2018.

Elenda harviyata, “*Asas-Asas Hukum Acara Pidana*”, <https://elandaharviyata.wordpress.com/2012/12/20/asas-asas-hukum-acara-pidana/> tanggal 10 mei 2021, Pukul 12.41 WIB.

Flora Dianti, “*Apa Perbedaan Alat Bukti Dengan Barang Bukti*”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8c99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-/> tanggal 8 juni 2021, Pukul 17.55 WIB.

Jurnal, Adam Ilyas, “*Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia*”, Januari 2021.

Josua Sitompul, “*Video Sebagai Bukti Permulaan Untuk Menetapkan Tersangka*”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fa7984db0725/video->

sebagai-permulaan-untuk-menetapkan-tersangka/ tanggal 08 Mei 2021, Pukul 14.09 WIB.

Letezia Tobing, “*Tentang Sistem Pembalikan Beban Pembuktian*”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513ff99d6eedf/tentang-sistem-pembalikan-beban-pembuktian/>, 24 Januari 2021. Pukul 10.00 WIB.

Letezia Tobing, “*Tentang Asas Praduga Tak Bersalah*”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah/&usg=AFQjCNGIKRWleMt3ruwHoRVfQNI414HnFA>, Jam 20.26 WIB, 18 Maret 2021.

Anonim, “*Mengenal Exclusionary Rules*”, <https://bantuanhukum.or.id/mengenal-exclusionary-rules/> tanggal 4 Juni 2021, pukul 15.21 WIB.

Nur Laila & Arina Koyimatun, “*Kekuatan Pembuktiana Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*”, Jurnal hukum. 2014.

Paca Putusan Mahkamah Konstitusi, “*ICJR Dorong Pemerintah Atur Ulang Kedudukan Bukti Elektronik*”, <https://icjr.or.id/pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-icjr-dorong-pemerintah-atur-ulang-kedudukan-alat-bukti-elektronik/> 19 Juni 2021 Pukul 15.00 WIB.

Roro Ayu Ariananda, *et.al*, “*Penggunaan Alat Bukti Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) dalam Proses Peradilan Pidana*”, Jurnal, Desember 2017.

Rocky Marbun, “*Pengantar Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”, <https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2014/04/20/pengantar-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia-bagian-kesatu-I> tgl 19 Mei 2021 Pukul 20.45 WIB.

Trimbunnews, “*Pengambilan alat bukti elektronik harus sesuai prosedur*”, <https://www.trimbunnews.com/metropolitan/2016/09/26/pengambilan-alat-bukti--elektronik-harus-sesuai-prosedur>, Tanggal 19 Juni 2021, 20.14 WIB.